



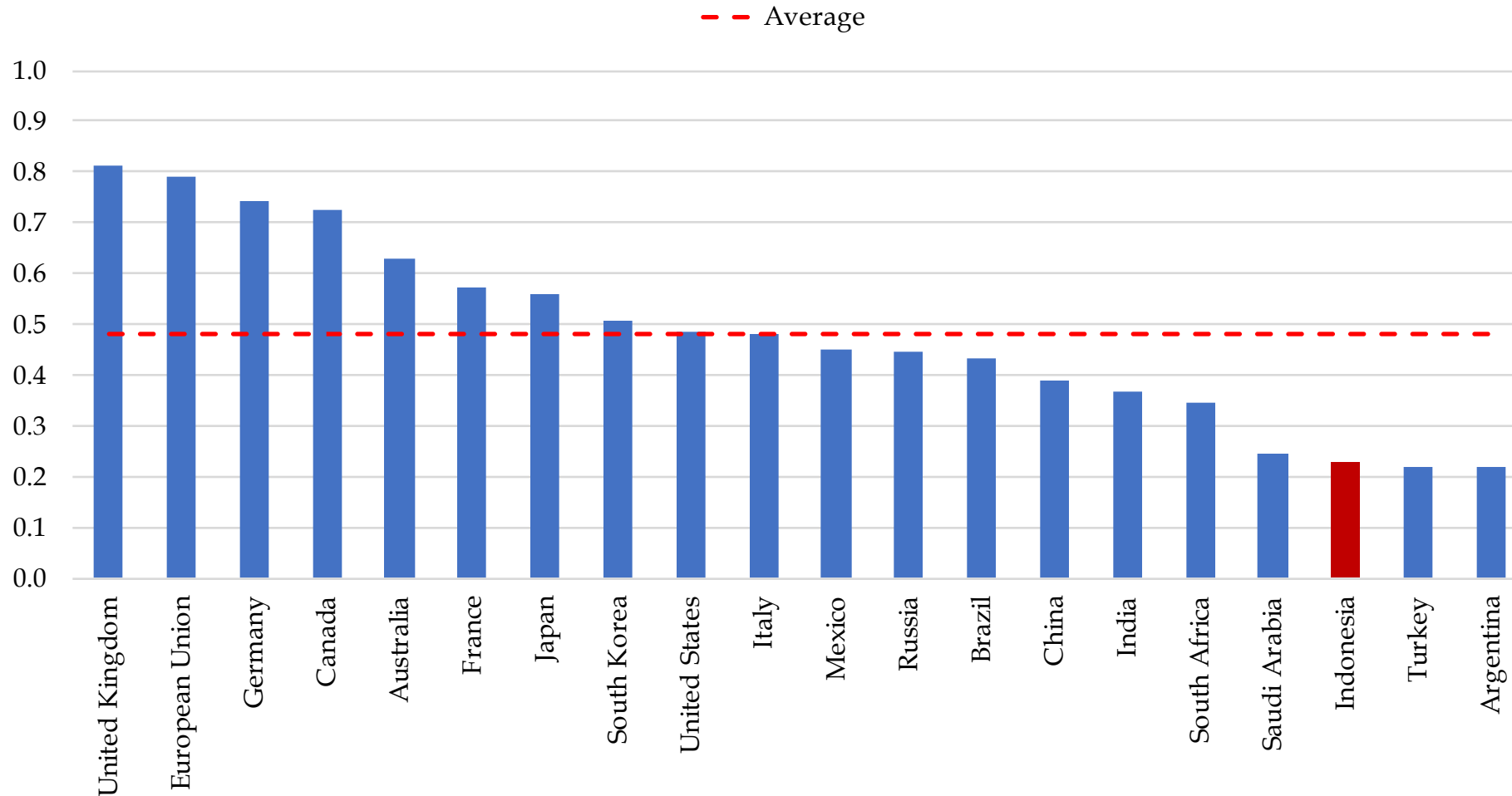
TILIK DATA

“G20 dan Prospek Pemulihan Ekonomi Global”

Indah Lestari
Reyhan Noor

18 Agustus 2021

Rata-rata Skor Kepatuhan Negara Anggota G20 terhadap Komitmen G20 (2008 - 2020)



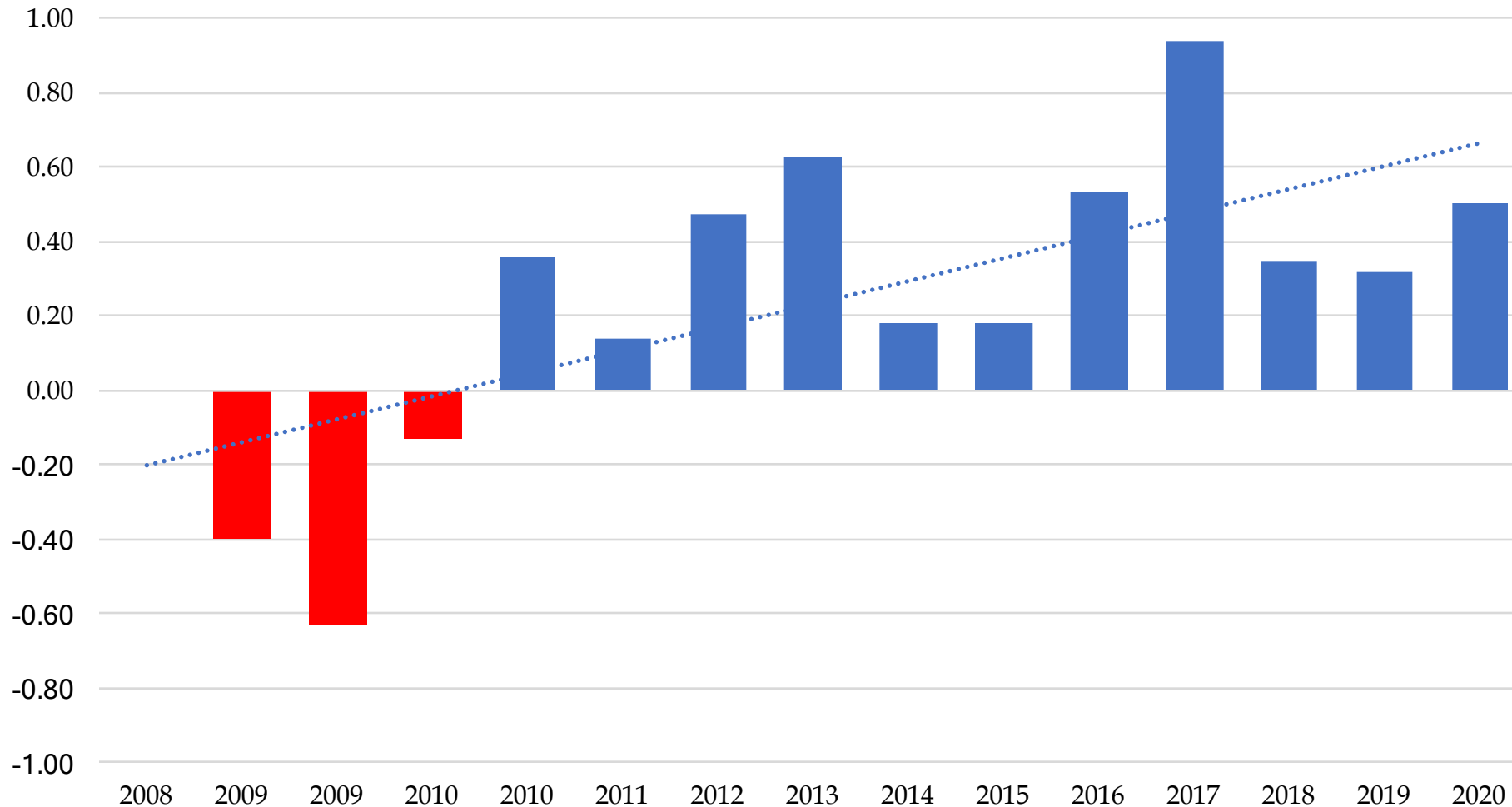
LAB 45 mengolah data yang dirilis oleh G20 Research Group untuk menilai kepatuhan setiap negara dalam memenuhi komitmen dari setiap pertemuan G20. Skor dilihat berdasarkan implementasi kebijakan di masing-masing negara yang relevan dengan komitmen G20.

Rata-rata skor kepatuhan dari seluruh anggota G20 sejak tahun 2008 hingga 2020 adalah 0,48. Hanya sebanyak 50% negara anggota yang memiliki tingkat kepatuhan lebih atau sama dengan rata-rata tersebut.

Berdasarkan skor kepatuhan ini, Indonesia menduduki posisi ketiga terbawah dari seluruh anggota G20.

Sebagai catatan, G20 yang bersifat *non-binding* membuat tidak adanya insentif/sanksi yang berlaku terkait dengan skor kepatuhan masing-masing negara.

Skor Kepatuhan Indonesia terhadap Komitmen G20 (2008 – 2020)



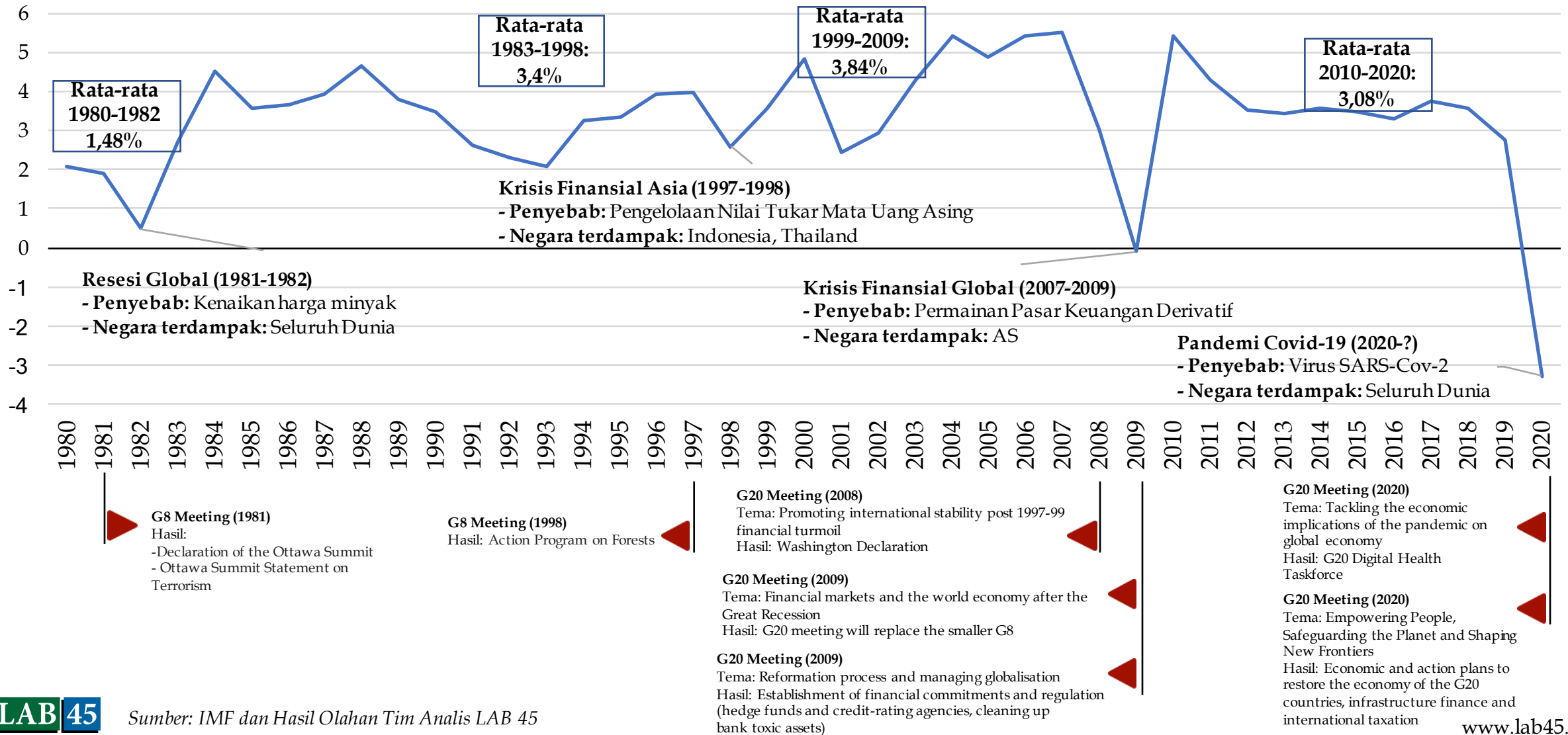
Telaah lebih lanjut terhadap skor kepatuhan Indonesia terhadap komitmen G20 menunjukkan tren yang terus membaik.

Pada masa awal keanggotaannya, Indonesia sempat memiliki skor negatif, tetapi bukan berarti Indonesia menentang komitmen yang sudah dibuat, melainkan akibat progres yang tidak signifikan.

Tahun 2017 menjadi skor kepatuhan tertinggi Indonesia sebesar 0,94 atau hampir *fully-complied*.

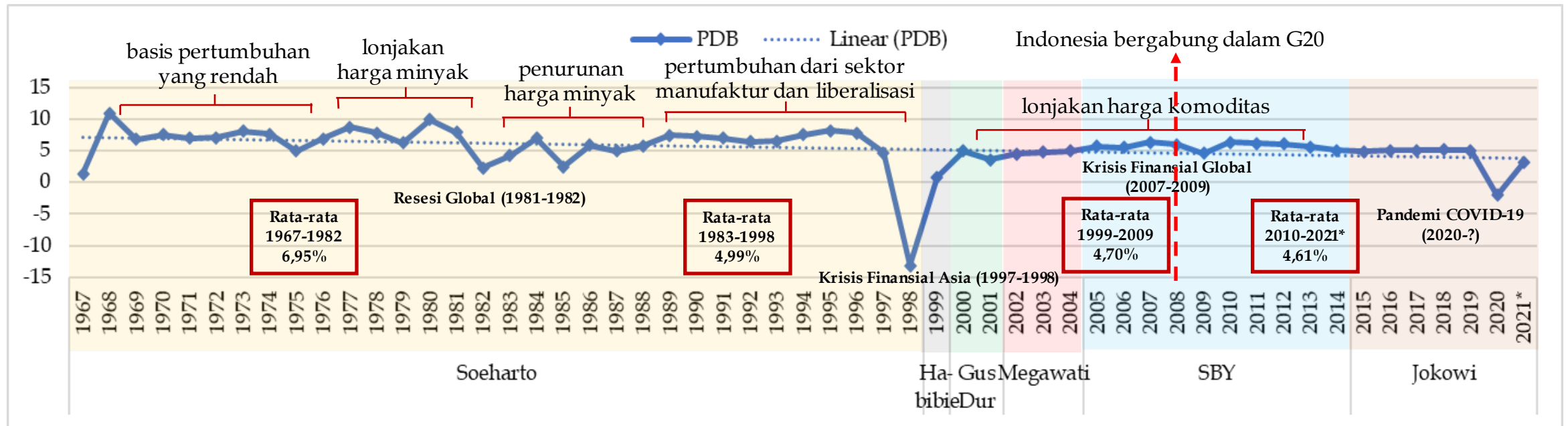
Laju Pertumbuhan Ekonomi Global sejak 1980

Tren peningkatan rata-rata pertumbuhan ekonomi global yang terjadi setelah Resesi Global (1981-82) dan Krisis Finansial Asia (1999-2009) terpaksa mengalami penurunan akibat Pandemi Covid-19. Dari setiap krisis ekonomi yang terjadi sejak 2008, G20 Meeting cenderung fokus kepada pembahasan proses mitigasi agar tidak terjadi krisis yang sama di masa depan daripada menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung.



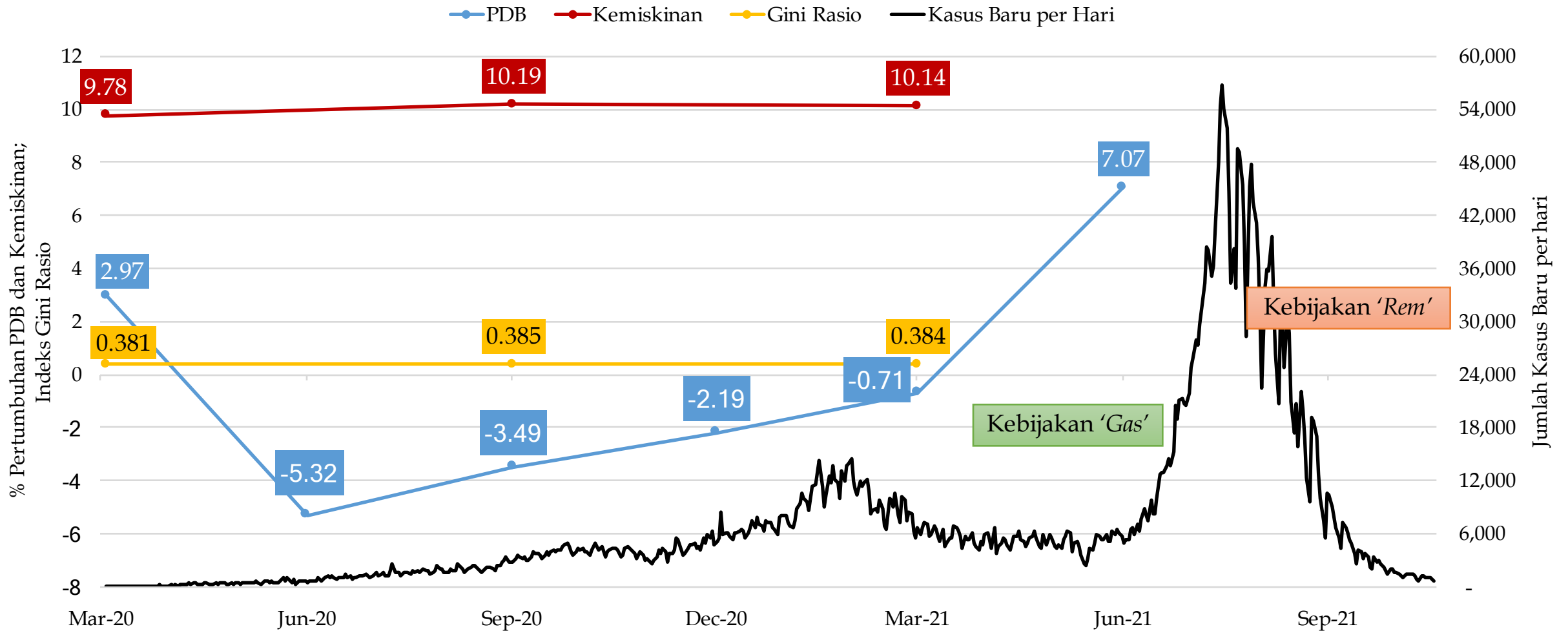
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sejak Orde Baru (% YoY)

Sejak bergabung dalam G20 tahun 2008, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan bahkan tren penurunan terus berlanjut sejak orde baru. Meski begitu, hubungan kausalitas antara keanggotaan di G20 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih perlu diteliti lebih lanjut lagi.



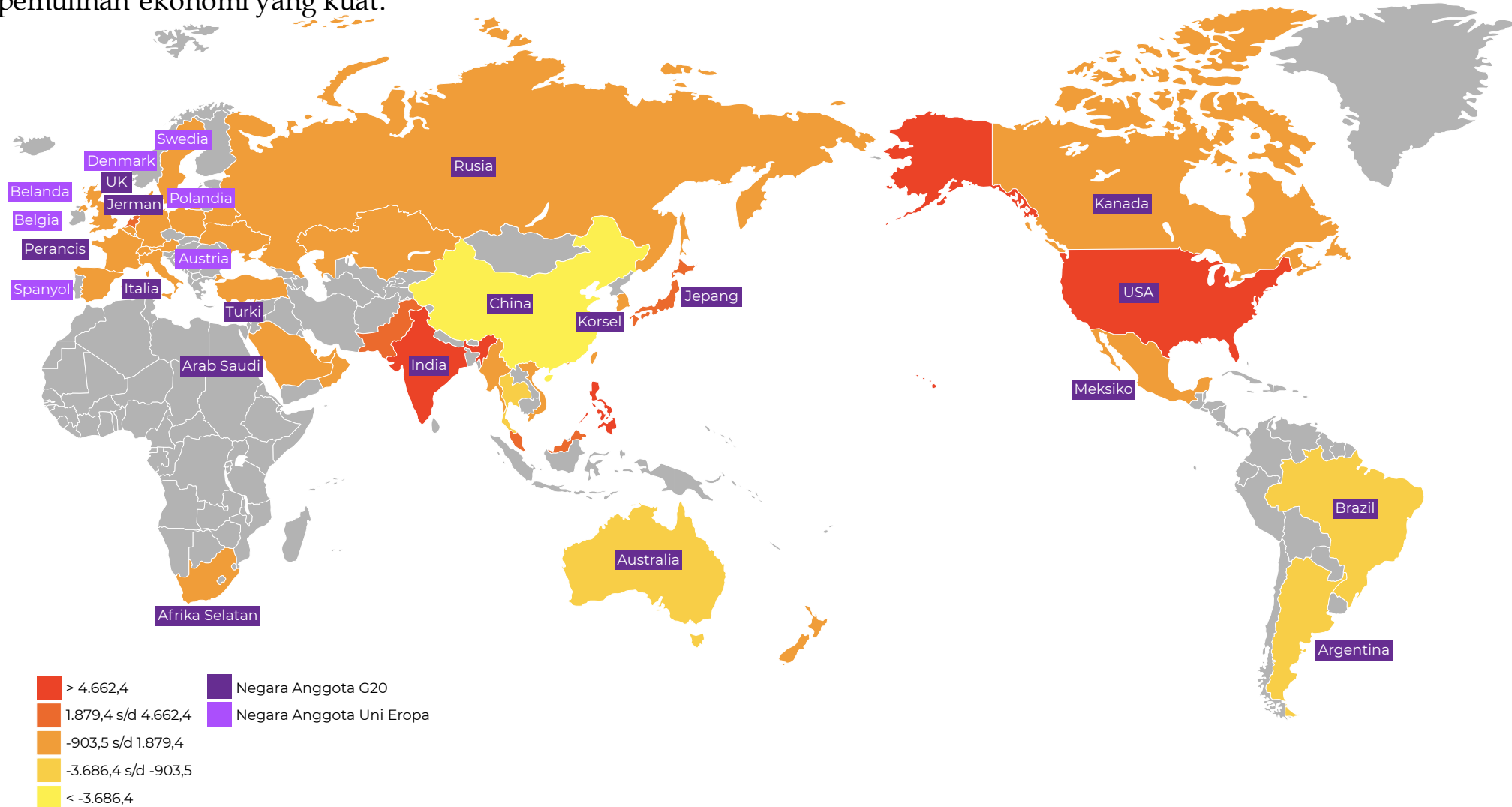
Kebijakan 'Gas dan Rem' Presiden Joko Widodo

Kebijakan 'Gas dan Rem' Presiden Joko Widodo memberikan hasil yang cukup positif di mana cenderung mampu menghambat penurunan laju pertumbuhan PDB, peningkatan persentase kemiskinan, dan peningkatan indeks ketimpangan. Namun, tren pemulihan ekonomi tampaknya masih perlu melihat laporan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga terkait kebijakan 'Rem' beberapa bulan yang lalu.



Hubungan Mitra Dagang Utama dan Keanggotaan G20

Hasil pemetaan antara mitra dagang utama Indonesia dan keanggotaan G20 menunjukkan bahwa China, Amerika Serikat, dan India merupakan mitra strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah karena sebagai asal impor barang modal dan tujuan pasar ekspor untuk memastikan pemulihan ekonomi yang kuat.



Keypoints Pidato Presiden Joko Widodo pada G20 Tahun 2021

Tiga upaya untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, (1) menggalang solidaritas, seperti inisiatif *debt service suspension*, untuk memberikan ruang kebijakan bagi negara berpendapatan rendah dan menengah; (2) membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang untuk menutup *financing gap*, termasuk inisiatif *blended finance*; (3) kebijakan yang adaptif di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, dan kapasitas perencanaan serta implementasi pembangunan

Disrupsi rantai pasok global menghambat terwujudnya pemulihan yang kuat dan inklusif. Dampak disrupsi lebih terasa bagi negara berkembang di mana terbatasnya akses vaksin, alat kesehatan, dan obat-obatan

Tujuan utama adalah mewujudkan ekosistem rantai pasok yang tangguh, *diversified*, dan berkelanjutan, tidak hanya berbasis ekonomi melainkan pembangunan.

Dalam jangka pendek, terdapat dua hal yang harus dipastikan (1) reaktivasi konektivitas global, dan (2) peningkatan kapasitas dan kesempatan sektor swasta dalam mengakses rantai pasokan global.

Dalam jangka panjang, memerlukan tiga kolaborasi antar negara untuk (1) penguatan infrastruktur logistik, (2) diversifikasi sumber pasokan, dan (3) menanggulangi risiko proteksionisme perdagangan.

